

Strategi Penanggulangan Perundungan di SD: Urgensi dan Dukungan Stakeholders

Dita Amelia¹, Rusi Rusmiati Aliyyah²

Universitas Djuanda^{1,2}

Corresponding Author: imelditaamelia@gmail.com

Abstrak

Perundungan di Sekolah Dasar (SD) merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penanggulangan perundungan di SD, dengan menekankan urgensi dan dukungan stakeholder. Menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 14 guru SD di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bogor yang memiliki pengalaman menangani kasus perundungan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan meliputi pendekatan emosional, bimbingan dan konseling, mediasi, dan sanksi edukatif. Kendala yang dihadapi antara lain siswa yang tidak melapor, ketidaksadaran pelaku, dan minimnya kolaborasi dengan orang tua. Meskipun sekolah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), keberhasilan implementasi tetap bergantung pada komitmen para pelaksana di lapangan. Komitmen tersebut perlu didukung oleh kolaborasi antara kepala sekolah, konselor, orang tua, dan komunitas eksternal agar strategi yang diterapkan berjalan secara sistematis, berbasis nilai, dan berkelanjutan. Hasil temuan ini dapat diimplementasikan dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan program di sekolah menjadi lebih konsisten dan efektif.

Kata kunci: Dukungan, Perundungan, Sekolah Dasar, Stakeholder, Strategi.

Abstract

Bullying in elementary schools is a serious problem that negatively impacts student development. This study aims to describe strategies for addressing bullying in elementary schools, emphasizing the urgency and stakeholder support. Using a quasi-qualitative approach with thematic analysis assisted by NVivo software, data were collected through interviews with 14 elementary school teachers in Belitung and Bogor Regencies who have experience handling bullying cases using a purposive sampling technique. The results indicate that the strategies used include emotional approaches, guidance and counseling, mediation, and educational sanctions. Obstacles encountered include students not reporting, perpetrators' unawareness, and minimal collaboration with parents. Despite having a Standard Operating Procedure (SOP), successful implementation depends heavily on the commitment of implementers. Support from the principal, counselors, parents, and the external community is key to the success of a systematic, values-based, and collaborative strategy.

Keywords: Support, Bullying, Elementary School, Stakeholders, Strategy

1. Pendahuluan

Perundungan di lingkungan SD merupakan fenomena yang masih sering terjadi dan menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan. Lingkup sekolah, perundungan dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu dengan tujuan menyakiti siswa yang lebih lemah secara fisik, verbal, atau psikologis (Maulia, Tetteng, & Hamid, 2021). Meskipun siswa SD masih berada pada tahap awal perkembangan, bentuk-bentuk perundungan seperti ejekan, pengucilan, intimidasi, hingga kekerasan verbal mulai muncul dan berdampak langsung terhadap kondisi psikologis serta akademik siswa. Tindakan seperti mengejek, menyebarkan gosip, memalak, hingga menghasut, sering kali dianggap remeh dan menjadi bagian dari dinamika sosial yang seharusnya tidak dapat ditoleransi (Marasaoly & Umra, 2022). Nyatanya, perundungan bersifat berulang dan sistemik, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius, dini, dan tidak menunggu akibat yang lebih berat (Simbolon, Nurhasanah, & Putri, 2024).

Dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku serta lingkungan sekolah secara menyeluruh. Korban cenderung mengalami tekanan mental, hilangnya kepercayaan diri, hingga penurunan motivasi belajar yang bisa berlanjut menjadi trauma psikologis jangka panjang (Abdullah & Ilham, 2023). Lain sisi, pelaku yang tidak dibimbing secara tepat berisiko mengalami pembiasaan terhadap perilaku agresif. Selain itu, sekolah yang permisif terhadap kasus perundungan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, diskriminatif, dan tidak kondusif bagi tumbuh kembang siswa. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk pembiaran dan keterlibatan dalam kekerasan terhadap anak, (Kemensesneg, 2014). Oleh karena itu, penanggulangan perundungan merupakan kebutuhan mendesak dan harus menjadi bagian dari sistem perlindungan di satuan pendidikan. Sebagai pendidik utama di sekolah, guru memegang peran strategis karena dituntut memiliki kompetensi yang dapat menciptakan suasana belajar yang aman, positif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Aliyyah, 2021). Kualitas guru menjadi salah satu faktor kunci dalam lingkungan sekolah yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses belajar siswa (Aliyyah, Rusmiati, Widyasari, Rasmitadila, Sri, wahyuni, & Megan, Asri, 2020). Keteladanan, kepedulian, serta kemampuan guru dalam merespons dinamika sosial di kelas sangat berperan dalam mencegah dan menangani kasus perundungan secara efektif.

Urgensi penanggulangan perundungan di tingkat SD sangat tinggi yang merupakan momen krusial dalam pembentukan karakter empati, dan keterampilan sosial siswa. Nilai-nilai seperti toleransi, keberanian menyampaikan pendapat, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai harus ditanamkan sejak dini dan dikontekstualisasikan dalam seluruh proses pembelajaran (Diniah Safara, Al Falaq Saiful Aziz, Sabillah Vania Indah, & Maulana Rijal, 2024). Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai tempat memberi dan menerima pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang yang aman dan mendukung perkembangan sosial serta emosional peserta didik. Penanggulangan perundungan pun tidak bisa dilakukan secara insidental, melainkan harus dirancang secara strategis, dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan semua pihak.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi strategi penanggulangan perundungan di SD masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya pelaksanaan kebijakan, minimnya pelatihan guru, kurangnya keterampilan konseling, serta belum optimalnya pelibatan orang tua menjadi kendala utama. Faktanya, strategi yang baik hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh sinergi antarpihak, baik internal maupun eksternal sekolah. Ketika dukungan stakeholder seperti guru, kepala sekolah, orang tua, konselor, hingga lembaga eksternal tidak optimal, maka strategi penanggulangan akan kehilangan kekuatannya dan menjadi tidak berkelanjutan (Gunawan & Hasnawati, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam menggambarkan strategi penanggulangan perundungan di sekolah dasar melalui optimalisasi kebijakan sekolah dan

penguatan peran seluruh stakeholder secara kolaboratif. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti dampak atau bentuk perundungan, studi ini menekankan pada implementasi strategi berbasis kolaborasi dan nilai karakter yang diterapkan guru di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman deskriptif tentang kasus perundungan, tetapi juga menawarkan model strategis yang dapat diadaptasi oleh sekolah lain dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penanggulangan perundungan di SD dengan fokus pada optimalisasi kebijakan sekolah serta penguatan peran stakeholder dalam menciptakan budaya sekolah yang bebas perundungan.

2. Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur kualitatif dan kuantitatif secara sederhana untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penanggulangan perundungan di SD. Pendekatan ini memanfaatkan karakteristik kualitatif dalam menggali makna dan pengalaman partisipan secara mendalam, namun juga mengadaptasi prinsip kuantitatif secara terbatas untuk memberikan penguatan berupa data numerik deskriptif (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Dengan demikian, pendekatan kuasi-kualitatif dapat dipahami sebagai bentuk *mixed methods* sederhana yang menekankan dominasi analisis kualitatif namun tetap mempertimbangkan temuan empiris yang terukur. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan menekankan pada pencarian dan pemaknaan makna sebagai unsur yang paling penting dalam proses interpretasi data (Cropley, 2019). Meskipun pendekatannya bersifat kualitatif, penelitian ini tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik penelitian kualitatif murni karena menggunakan instrumen angket terbuka serta analisis tematik berbasis frekuensi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Research Design* (SRD) (Saksono & Bernardus, 2023), yang mengedepankan pemecahan masalah konkret berdasarkan temuan empiris dan teori yang relevan. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada upaya strategis penanggulangan perundungan di SD, di mana fenomena sosial yang kompleks perlu dianalisis secara sederhana namun mendalam agar dapat ditemukan solusi yang aplikatif. Dengan menggunakan SRD, peneliti dapat memadukan hasil observasi lapangan dan kajian teoritis untuk menghasilkan rekomendasi yang kontekstual bagi penguatan kebijakan sekolah serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Proses penelitian dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi isu sosial berupa perundungan di SD dan perumusan fokus penelitian, (2) peninjauan literatur sebagai dasar teoritis, (3) pengumpulan data melalui angket terbuka, (4) analisis data secara tematik menggunakan NVivo, dan (5) penyajian hasil berdasarkan tema-tema yang muncul dari data lapangan. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket disusun untuk menggali refleksi guru terhadap empat aspek utama: strategi penanganan, kendala yang dihadapi, kebijakan sekolah, dan peran stakeholder dalam proses penanggulangan perundungan. Untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil angket dari beberapa responden guru serta member checking, yaitu meminta konfirmasi dari partisipan terhadap hasil interpretasi peneliti. Selain itu, proses analisis dilakukan secara transparan dan terdokumentasi melalui audit trail dalam perangkat lunak NVivo, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah 14 guru SD yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu guru yang aktif mengajar di SD dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah. Guru-guru ini berasal dari berbagai latar belakang sekolah di wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian angket daring berbentuk kuesioner terbuka yang disebarluaskan secara online. Penelitian tidak memfokuskan pada deskripsi demografis seperti usia, jenis kelamin, atau latar pendidikan

secara rinci, karena fokus utama terletak pada konten naratif yang menggambarkan pengalaman empiris para guru dalam menangani perundungan di sekolah. Data demografis yang dikumpulkan mencakup jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir, serta lama mengajar sebagai variabel deskriptif untuk memahami latar belakang partisipan secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan data demografis, seluruh partisipan penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa temuan penelitian lebih banyak merefleksikan perspektif guru perempuan dalam menangani kasus perundungan di sekolah dasar. Mayoritas partisipan berusia antara 20–25 tahun, yang menandakan bahwa sebagian besar masih berada pada tahap awal karier sebagai pendidik. Kondisi ini dapat memengaruhi cara mereka memahami dan merespons perundungan, karena pengalaman kerja yang relatif singkat dapat membentuk strategi penanganan yang berbeda dibandingkan guru yang lebih senior. Oleh karena itu, karakteristik demografis ini perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil penelitian agar konteks pengalaman partisipan lebih jelas terlihat.

Tabel 1 Data Demografis

Profil Responden	Frekuensi	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	14	100%
Laki-laki	0	0%
Usia		
20–25 tahun	6	42,86%
26–30 tahun	1	7,14%
31–35 tahun	4	28,57%
36 tahun ke atas	3	21,43%
Jenjang Pendidikan		
SMA	2	14,29%
S1	12	85,71%
Lama Mengajar		
1–4 tahun	6	42,86%
5–10 tahun	7	50%
>10 tahun	1	7,14%

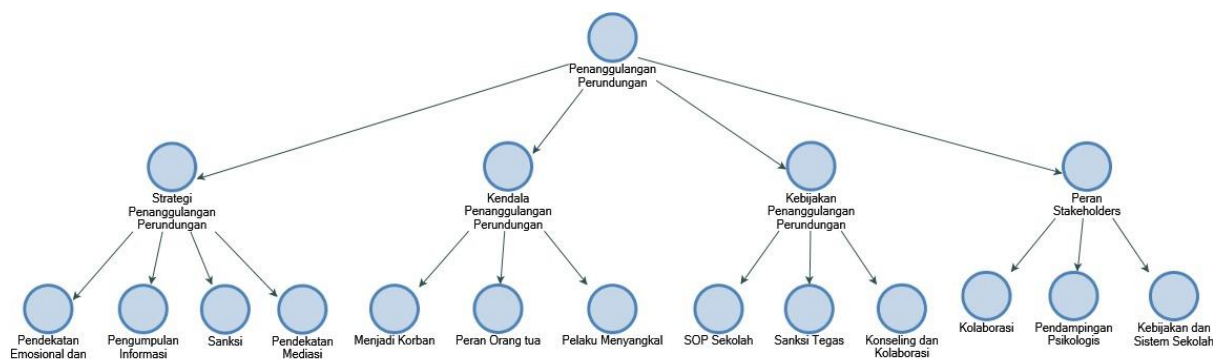
Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan wawancara terbuka yang berisi delapan pertanyaan reflektif yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman guru dalam menghadapi perundungan di SD. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun berdasarkan empat tema utama, yaitu strategi penanggulangan, kendala yang dihadapi, kebijakan sekolah, dan peran stakeholder. Wawancara dilakukan secara daring melalui zoom, dan responden diminta untuk memberikan jawaban secara terbuka sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Proses pengumpulan data berlangsung selama 8 hari dan dilakukan secara penuh melalui media online. Setelah seluruh data terkumpul, jawaban para responden ditranskrip dan dipersiapkan untuk proses analisis data lebih lanjut menggunakan perangkat lunak NVivo.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik yang dikelola dengan bantuan perangkat lunak NVivo versi 1. Seluruh jawaban responden diinput ke dalam NVivo, kemudian dilakukan proses pengkodean awal terhadap kutipan-kutipan yang relevan dengan tema penelitian. Kode-kode yang memiliki makna serupa dikelompokkan ke dalam node (kategori), yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema dominan yang muncul dari data. Proses analisis ini membantu peneliti dalam mengorganisasi narasi secara sistematis serta memastikan bahwa setiap tema yang terbentuk benar-benar

mencerminkan pengalaman dan perspektif para guru. Dengan menggunakan NVivo, peneliti dapat menelusuri keterkaitan antar jawaban dan memperkuat validitas interpretasi melalui dukungan visualisasi data dan kemunculan frekuensi tema secara otomatis.



Gambar 1. Penanggulangan Perundungan

Gambar ini menggambarkan empat tema utama hasil analisis, yaitu strategi penanggulangan, kendala penanggulangan, kebijakan sekolah, dan peran stakeholder. Keempat tema tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penanggulangan perundungan di sekolah dasar melibatkan berbagai pihak. Guru berperan melalui pendekatan edukatif dan mediasi, sementara kendala muncul dari kurangnya dukungan orang tua dan sikap pelaku yang menyangkal. Kebijakan sekolah serta kolaborasi dengan stakeholder eksternal menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Strategi Penanggggulangan Perundungan

Strategi penanggulangan perundungan di SD dilakukan melalui kombinasi pendekatan emosional, edukatif, dan prosedural. Mayoritas guru menyatakan bahwa langkah pertama yang mereka ambil adalah memberi pemahaman kepada pelaku dan dukungan emosional kepada korban. Pada berbagai kasus, guru juga berupaya menggali informasi lengkap dari semua pihak yang terlibat korban, pelaku, dan saksi untuk mendapatkan gambaran objektif sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pendekatan mediasi dan konseling menjadi metode yang banyak diterapkan, terutama untuk memulihkan hubungan sosial antara siswa yang terlibat. Sebagian guru justru menekankan pentingnya pemberian sanksi yang bersifat edukatif sebagai efek jera, serta keterlibatan orang tua dan pihak sekolah seperti kepala sekolah atau konselor jika kasus tergolong berat. Strategi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan humanis dan ketegasan dalam menangani kasus perundungan.



Gambar 2. Strategi Penanggulangan Perundungan

Gambar ini menunjukkan empat strategi utama yang digunakan guru dalam menanggulangi perundungan, yaitu *pendekatan emosional dan edukasi*, *pengumpulan informasi*, *pemberian sanksi*, dan *pendekatan mediasi*. Strategi tersebut menggambarkan upaya guru untuk

tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membangun kesadaran dan empati melalui pendekatan edukatif. Pengumpulan informasi dilakukan untuk memahami konteks peristiwa secara menyeluruh, sementara mediasi menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai agar hubungan antar siswa dapat pulih

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa strategi yang dilakukan berfokus pada pendekatan emosional, mediasi, hingga konseling mendalam.

"Penanggulangan perundungan dilakukan dengan memberi konsekuensi sesuai tingkat kesalahan dan melibatkan anak dalam memperbaiki perbuatannya."

Guru 6

Guru 6 menekankan bahwa pemberian konsekuensi tidak bertujuan untuk menghukum semata, melainkan untuk membentuk kesadaran moral siswa terhadap pentingnya saling menghargai dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Ia percaya bahwa melalui pendekatan ini, siswa akan lebih memahami nilai-nilai sosial dan empati, sehingga kasus perundungan tidak berulang di masa depan

"Kami biasanya koordinasi juga dengan kepala sekolah atau guru BK, apalagi kalau kasusnya sudah berat. Tujuannya supaya semua pihak merasa adil."

Guru 10

Guru 10 menekankan bahwa koordinasi ini penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, baik itu korban, pelaku, maupun orang tua. Proses penanganan yang kolaboratif juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan berdampak jangka panjang, terutama dalam membangun iklim sekolah yang aman dan suportif bagi semua siswa.

Dari wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa strategi penanggulangan perundungan di SD dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup dukungan emosional, mediasi, konseling, hingga pemberian sanksi edukatif. Guru-guru menekankan pentingnya pendekatan personal kepada siswa yang terlibat, baik korban maupun pelaku, sebagai langkah awal untuk memahami akar permasalahan dan membangun komunikasi yang terbuka. Selain itu, keterlibatan pihak lain seperti kepala sekolah, guru BK, dan orang tua dianggap krusial untuk menjamin proses penanganan berjalan adil dan tuntas. Strategi ini tidak hanya menekankan penyelesaian konflik, tetapi juga mengajarkan nilai tanggung jawab, empati, dan perbaikan diri kepada siswa. Hal ini menegaskan bahwa penanggulangan perundungan bukanlah semata tindakan korektif, melainkan bagian penting dari proses pendidikan karakter dan pembentukan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan berdaya dukung bagi semua peserta didik.

Kendala Penanggulangan Perundungan

Guru-guru yang menjadi narasumber mengungkapkan berbagai kendala dalam menangani kasus perundungan. Kendala utama yang paling sering disebutkan adalah sikap diam atau tertutup dari korban karena takut, malu, atau trauma, yang menyulitkan guru dalam mengetahui adanya kasus sejak dini. Di sisi lain, pelaku sering kali menyangkal tindakan mereka, atau menganggap perundungan sebagai hal biasa dalam pergaulan, yang menunjukkan minimnya pemahaman tentang bentuk dan dampak perundungan. Selain itu, kurangnya peran serta orang tua dalam mendampingi anak di rumah menjadi tantangan tersendiri dalam membangun karakter dan menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah. Ada juga guru yang menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua justru menjadi kendala ketika mereka terlalu emosional dan terus mempermasalahkan kasus yang sebenarnya telah diselesaikan dengan damai oleh siswa. Ini menunjukkan bahwa penanganan perundungan memerlukan pendekatan yang sabar, dialogis, dan kolaboratif dengan berbagai pihak.



Gambar 3. Kendala Penanggulangan Perundungan

Gambar ini menggambarkan tiga kendala utama dalam proses penanggulangan perundungan, yaitu *menjadi korban kembali*, *peran orang tua yang belum optimal*, dan *pelaku yang menyangkal tindakan perundungan*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus sering kali terhambat oleh faktor psikologis dan sosial. Korban cenderung enggan melapor karena takut stigma atau balasan, sementara sebagian orang tua kurang terlibat aktif dalam proses penyelesaian. Di sisi lain, pelaku sering kali tidak menyadari atau menolak mengakui kesalahannya, sehingga proses mediasi dan pembinaan menjadi kurang efektif.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru tergambar bahwa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pelaporan dari korban, penyangkalan dari pelaku, serta peran orang tua yang belum optimal.

"Kendala utama adalah korban cenderung diam dan enggan melapor." Guru 1

Guru 1 menekankan bahwa keberanian korban untuk berbicara merupakan titik awal yang sangat penting dalam proses penyelesaian kasus perundungan. Tanpa pelaporan, guru akan mengalami keterlambatan dalam mengambil tindakan, yang pada akhirnya dapat memperparah dampak psikologis pada korban.

"Pelaku banyak yang mengelak, tidak mengakui perbuatannya, bahkan menganggap itu cuma bercanda." Guru 8

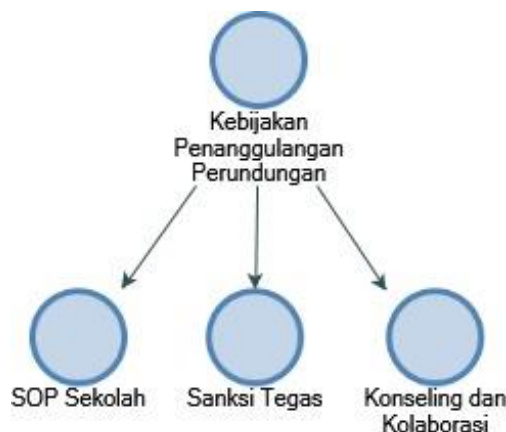
Guru 8 menekankan bahwa kurangnya pemahaman tentang batas antara bercanda dan menyakiti menjadi celah yang perlu ditangani melalui edukasi. Ia menyarankan agar sekolah rutin memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk perundungan secara eksplisit, sehingga siswa lebih sadar akan dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa penanggulangan perundungan di SD masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Guru-guru menyoroti bahwa korban sering kali enggan melapor karena takut atau malu, sementara pelaku cenderung menyangkal dan tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk perundungan. Selain itu, orang tua siswa belum sepenuhnya menjadi mitra strategis dalam penyelesaian kasus, bahkan dalam beberapa kasus justru memperumit situasi. Kurangnya budaya pelaporan, ketidaktahuan tentang bentuk perundungan, dan minimnya sinergi dengan orang tua menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan responsif terhadap kasus perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa selain penanganan langsung terhadap kasus, perlu upaya edukasi berkelanjutan dan kolaborasi erat antar pihak sekolah, siswa, dan orang tua untuk membentuk sistem penanggulangan perundungan yang efektif dan menyeluruh.

Kebijakan Penanggulan Perundungan

Sebagian besar sekolah telah memiliki kebijakan atau prosedur tertentu dalam menangani kasus perundungan, meskipun tingkat penerapannya berbeda-beda. Beberapa sekolah telah menyusun SOP yang meliputi tahapan pelaporan, pemeriksaan, pemanggilan pihak terkait, pemberian sanksi, hingga pendampingan psikologis. Namun, ada pula sekolah yang menyerahkan penanganan secara penuh kepada guru kelas tanpa dukungan sistem yang komprehensif. Secara

umum, kebijakan penanggulangan perundungan lebih menekankan pendekatan mediasi dan konseling dengan melibatkan pihak sekolah dan keluarga. Beberapa sekolah juga telah menetapkan sanksi yang bersifat mendidik untuk pelaku, seperti permintaan maaf tertulis, kegiatan sosial, atau konsultasi dengan guru BK. Kebijakan ini mencerminkan upaya sekolah untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membina dan mencegah terulangnya kasus serupa.



Gambar 4. Kebijakan Penanggulan Perundungan

Gambar ini menggambarkan tiga komponen utama dalam kebijakan penanggulangan perundungan di sekolah, yaitu *SOP Sekolah*, *Sanksi Tegas*, serta *Konseling dan Kolaborasi*. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem kebijakan yang berorientasi pada mediasi, edukasi, dan pencegahan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa sekolah telah menjalankan kebijakan yang berorientasi pada mediasi, sanksi edukatif, dan konseling kolaboratif.

"Kebijakan sekolah adalah menindaklanjuti kasus langsung dan memberi edukasi pada siswa yang terlibat." Guru 3

Guru 3 menekankan bahwa proses penanganan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga memberikan pemahaman agar siswa menyadari konsekuensi dari tindakannya dan tidak mengulangnya. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara cepat, tetapi juga membangun nilai tanggung jawab dan empati dalam diri siswa.

"Sekolah memiliki SOP, mulai dari laporan awal, investigasi, sanksi, hingga pendampingan bagi korban dan pelaku." Guru 10

Guru 10 menekankan bahwa kehadiran SOP yang jelas sangat membantu guru dalam bertindak cepat dan tepat, serta menjamin transparansi proses penanganan agar setiap pihak merasa dilibatkan dan diperlakukan secara adil. Ia juga percaya bahwa SOP yang terstruktur dapat mencegah terjadinya konflik berulang dan membangun kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa kebijakan penanggulangan perundungan di SD telah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, dengan pendekatan yang menggabungkan aspek ketegasan, edukasi, dan pemulihan psikologis. Guru-guru menekankan pentingnya keberadaan SOP yang jelas sebagai panduan tindakan, mulai dari pelaporan, investigasi, hingga pendampingan. Selain itu, proses mediasi dan edukasi menjadi bagian penting dalam membina kembali hubungan sosial siswa dan mencegah perundungan berulang. Kebijakan ini juga menyesuaikan pendekatannya berdasarkan kondisi emosional siswa, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan karakter dan empati peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan perundungan bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendidik.

Peran Stakeholder dalam Menanggulangi Perundungan

Penanggulangan perundungan di SD memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara, guru merasa bahwa meskipun mereka adalah aktor utama dalam menangani kasus, dukungan dari stakeholder lain seperti kepala sekolah, orang tua, dan konselor sekolah sangat penting untuk keberhasilan intervensi. Kolaborasi ini diperlukan agar upaya penanggulangan tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih terkoordinasi. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak dan memberikan informasi tambahan mengenai latar belakang perilaku mereka. Konselor atau guru BK juga sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan psikologis, baik kepada korban maupun pelaku. Sinergi antara semua pihak membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, suportif, dan siap menangani masalah sosial-emosional siswa secara tuntas.



Gambar 5. Peran Stakeholder Menanggulangi Perundungan

Gambar ini menggambarkan tiga peran penting stakeholder dalam menanggulangi perundungan, yaitu *Kolaborasi*, *Pendampingan Psikologis*, serta *Kebijakan dan Sistem Sekolah*. Kolaborasi yang ai kantar pihak dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan membantu pemulihan emosional siswa.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa peran guru, orang tua, dan konselor sangat penting dalam proses penanggulangan perundungan secara menyeluruh.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan orang tua dan sekolah sangat membantu." Guru 4

Guru 4 menekankan bahwa ketika guru, orang tua, dan pihak sekolah saling bekerja sama dan membagi peran dengan seimbang, maka pendekatan terhadap siswa menjadi lebih menyeluruh tidak hanya dari sisi disiplin, tetapi juga pemulihan emosional dan pembinaan karakter.

"Yang berperan utama pastinya guru. Tapi kalau tidak mampu menyelesaikan, kami minta bantuan rekan guru atau kepala sekolah, lalu menghubungi orang tua." Guru 9

Guru 9 menekankan bahwa keterbukaan guru dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak justru menunjukkan profesionalisme dalam menyelesaikan masalah. Ia percaya bahwa sinergi yang solid antara guru dan stakeholder lain sangat penting agar proses penyelesaian berjalan efektif dan objektif.

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, tergambar bahwa keberhasilan penanggulangan perundungan di SD sangat ditentukan oleh keterlibatan semua pihak, terutama guru, orang tua, dan konselor sekolah. Guru memiliki peran utama dalam mengamati dan menangani kasus secara langsung di lingkungan kelas. Namun, dukungan orang tua dalam pembentukan karakter di rumah dan kehadiran konselor sebagai pendamping psikologis memberikan kekuatan tambahan dalam menyelesaikan dan mencegah kasus perundungan secara efektif. Guru-guru menekankan bahwa pendekatan kolaboratif memperkuat respon terhadap kasus perundungan dari berbagai sisi emosional, sosial, dan edukatif. Sinergi ini menunjukkan bahwa membangun lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan

bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan merupakan upaya bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Analisis Perbedaan Berdasarkan Lama Mengajar dan Usia Guru

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi strategi penanggulangan perundungan berdasarkan lama mengajar dan usia guru. Guru dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun cenderung mengedepankan pendekatan emosional dan mediasi dalam menyelesaikan konflik antarsiswa. Mereka lebih sabar, reflektif, dan fokus pada pembinaan karakter siswa melalui dialog dan empati. Sementara itu, guru dengan pengalaman di bawah 5 tahun lebih banyak menekankan aspek prosedural, seperti pemberian sanksi edukatif dan pelaporan formal kepada kepala sekolah atau guru BK. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mengajar berpengaruh terhadap gaya penanganan kasus, di mana guru senior lebih mengandalkan intuisi dan hubungan interpersonal, sedangkan guru muda lebih patuh pada aturan formal. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendorong perubahan perilaku positif pada siswa.

Pembahasan

Penanggulangan perundungan di SD merupakan bagian penting dari manajemen sekolah dan penguatan pendidikan karakter. Perundungan tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa, sebab pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti pihak yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (Maulia et al., 2021). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa strategi guru dalam menangani perundungan belum hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengarah pada pembentukan kesadaran sosial dan karakter empatik. Hal ini sejalan dengan pandangan Marasaoly & Umra, 2022 bahwa lemahnya nilai kemanusiaan dalam pendidikan berakar pada kurangnya penguatan empati sosial di sekolah dasar. Oleh karena itu, strategi penanggulangan perlu diorientasikan pada upaya sistematis dan kolaboratif sejak dini (Aliyandi A. Lumbu et al., 2024).

Strategi yang diterapkan guru bersifat menyeluruh dan adaptif terhadap kondisi siswa serta dinamika lingkungan sekolah. Pendekatan emosional dan konseling personal lebih dipilih dibandingkan sanksi yang bersifat hukuman semata. Hal ini mencerminkan implementasi pendekatan pendidikan humanistik yang menekankan pembinaan nilai moral dan tanggung jawab sosial (Sukmawati & Aliyyah, 2023). Analisis terhadap strategi ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai penegak disiplin, tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan emosional siswa. Pembimbingan terhadap pelaku dan korban dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran reflektif atas dampak emosional dari perundungan (Rahmelia, Prihadi, & Nopitha, 2023). Pendekatan ini efektif dalam membangun kontrol diri dan empati, dua komponen penting dalam pencegahan perilaku agresif (Firmansyah, 2021).

Namun demikian, efektivitas strategi guru dipengaruhi oleh berbagai kendala struktural dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban enggan melapor karena rasa takut atau malu (Yonas & Suherman, 2024), sementara pelaku sering kali tidak menyadari bahwa tindakannya tergolong perundungan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa literasi sosial siswa masih rendah. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan sekolah masih terbatas, baik karena kurangnya pemahaman maupun sikap emosional dalam merespons kasus (Daniati & Aliyyah, 2023).

Sebagian besar sekolah telah memiliki SOP yang mengatur penanganan perundungan, meliputi pelaporan, investigasi, sanksi, dan pendampingan psikologis (Kiska et al., 2023). Namun, implementasinya bergantung pada komitmen dan konsistensi pihak sekolah. Analisis terhadap praktik pelaksanaan SOP menunjukkan bahwa meskipun prosedur sudah tersedia, aspek internalisasi nilai dan keteladanan guru sering kali menjadi faktor penentu efektivitasnya. Oleh karena itu, kebijakan anti-perundungan harus dikembangkan secara partisipatif, melibatkan siswa dan orang tua agar tidak hanya bersifat administratif. Praktik sosialisasi seperti program “Stop Perundungan” terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan sekolah

(Idris et al., 2024). Dengan demikian, kebijakan yang adil, humanis, dan berbasis kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan perundungan (Ardiawati & Aliyyah, 2024).

Analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi antarpihak merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam menekan kasus perundungan. Guru berperan sebagai penghubung antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah (Amelia & Yuliani, 2024). Namun, kolaborasi ini baru efektif bila didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan konselor (Nadia, Robiyatun, 2024). Konselor sekolah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan konseling dan ruang aman bagi siswa untuk melapor (Ardaniyah & Widiyono, 2023). Guru juga harus melaporkan kasus kepada pihak sekolah agar penanganannya terstruktur dan bukan berdasarkan asumsi pribadi, (Choiriyah, Masruroh, Imamah, Laili, & Kunaifi, 2024). Selain itu, adanya fasilitas seperti papan pengaduan dan forum diskusi siswa memperkuat sistem pelaporan yang lebih ramah anak (Andryawan, Laurencia, & Putri, 2023). Komunitas dan lembaga pemerintah juga berperan dalam memberikan pelatihan serta menyediakan sumber daya guna mendukung upaya sekolah dalam menangani perundungan (Idris et al., 2024). Hasil ini sejalan dengan teori ekologi Bronfenbrenner yang menegaskan pentingnya keterlibatan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku anak.

Pendekatan individual tetap menjadi aspek penting dalam penanggulangan perundungan. Guru menggunakan kombinasi antara sanksi edukatif, nasihat moral, dan penguatan perilaku positif (Ramadhanti & Hidayat, 2022). Analisis ini menunjukkan bahwa proses penanganan tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi berlanjut pada pembentukan karakter melalui kegiatan keagamaan, budaya saling menghormati, dan kerja sama antar siswa (Widopuspito & Sutarman, 2023).

Dari sisi struktural, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan (Nurhakim, Sanusi, Nur'aeni, & Muhammad, 2024). TPPK berperan sebagai wadah koordinasi lintas peran, yang melibatkan guru penggerak, kepala sekolah, konselor, dan orang tua. Analisis ini memperlihatkan bahwa keberadaan tim tersebut dapat meningkatkan efektivitas deteksi dini dan intervensi terhadap kasus perundungan (Muhammad, Eq, & Suhartini, 2021). Selain itu, peran konselor dalam memberikan layanan komprehensif, termasuk mediasi dan advokasi, menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas program (Damayanti et al., 2023).

Pendekatan hukum yang digunakan di sekolah dasar cenderung non-penal, karena lebih menekankan aspek pendidikan dan pembinaan moral dibandingkan hukuman (Avianingrum, 2024). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pencegahan perundungan lebih efektif bila dilakukan melalui pendidikan karakter, terapi emosi, dan penguatan perilaku positif (Putra Damawangsa & Muhimmah, 2025). Pendekatan non-penal yang terintegrasi dengan strategi sosial dan psikologis menjadikan penanggulangan perundungan lebih humanis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi penanggulangan perundungan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan sekolah, peran guru, dan partisipasi orang tua. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang dikumpulkan bersumber dari refleksi guru, sehingga potensi subjektivitas dalam interpretasi masih mungkin terjadi. Kedua, penelitian ini belum menggali perspektif siswa atau orang tua, padahal keterlibatan mereka penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, penelitian dilakukan dalam konteks sekolah tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan triangulatif yang melibatkan berbagai pihak dan metode yang lebih mendalam. Dengan melihat berbagai strategi dan tantangan yang dihadapi guru, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan perundungan di sekolah dasar tidak hanya bergantung pada kebijakan atau SOP semata, tetapi juga pada sensitivitas sosial dan kemampuan reflektif guru dalam membangun komunikasi yang empatik. Pada titik ini, penting untuk meninjau posisi temuan penelitian ini dalam konteks kajian yang lebih luas.

Temuan penelitian ini memperkuat posisi penting guru sekolah dasar dalam peta penelitian anti-bullying di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti intervensi psikologis, kebijakan sekolah menengah, atau pendekatan berbasis

konseling, sementara penelitian ini menampilkan perspektif pedagogis yang berfokus pada praktik guru di kelas. Pendekatan yang dikembangkan guru melalui mediasi, dukungan emosional, dan pemberian sanksi edukatif menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan dapat dilakukan secara efektif dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memperluas arah kajian anti-bullying di Indonesia dengan menegaskan peran guru SD sebagai aktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, empatik, dan berkarakter, sekaligus menunjukkan bahwa strategi penanganan berbasis nilai dan kolaborasi memiliki relevansi tinggi dengan tujuan pendidikan karakter nasional.

4. Kesimpulan

Penanggulangan perundungan di sekolah dasar merupakan kebutuhan mendesak yang menuntut kolaborasi seluruh elemen sekolah. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan strategi penanganan perundungan berbasis peran guru di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan emosional, konseling, mediasi, dan sanksi edukatif.

Temuan ini memperluas peta penelitian anti perundungan di Indonesia dengan menegaskan bahwa efektivitas strategi guru sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarpihak serta budaya sekolah yang mendukung keterbukaan dan empati. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan sekolah seperti SOP penanganan kasus perlu diimplementasikan secara konsisten dan disertai pendampingan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan. Bagi guru, penting untuk memperkuat kemampuan komunikasi empatik, mengenali tanda-tanda perundungan secara dini, dan melakukan mediasi sederhana untuk memulihkan hubungan sosial siswa. Bagi sekolah, disarankan membentuk tim penanganan perundungan yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan orang tua agar koordinasi berjalan efektif dan berkesinambungan. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan panduan nasional atau modul praktis yang menstandarkan langkah-langkah penanganan perundungan di SD dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya sekolah.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, Gamar, & Ilham, Asni. (2023). Pencegahan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian: DIKMAS*, 03(1), 175–182. Retrieved from <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>
- Aliyandi A. Lumbu, Hesty Rindiani, Retna Ningsih, Nadzhifa Khairotunisa, Linda Khusnul Khotimah, Elsa Maylani, Dimas Adi Putra, & Kabul. (2024). Sosialisasi Bahaya Bullying dan Upaya Pencegahan Bullying Serta Pencegahan Game Online Secara Berlebihan di Lingkungan Sekolah pada Siswa/i dan SMK Desa Mulyosari. *Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 52–66. <https://doi.org/10.62951/panggungkebaikan.v1i4.685>
- Aliyyah, Rusmiati, Rusi, Widyasari, Rasmitadila, Sri, wahyuni, Ulfah, & Megan, Asri, Humaira. (2020). Outstanding Teachers ' Competition : Between Strategies and Challenges Rusi. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 400(Icream 2019), 153–157.
- Aliyyah, Rusi Rusmiati. (2021). Profesionalisme Guru sebagai Aset Pengembangan Mutu. *Researchgate.Net*, (July 2019), 1–21.
- Amelia, Dita, & Yuliani, Salma. (2024). Kolaborasi Guru dan Orang Tua untuk Inovasi Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar. *JIPSD: Jurnal Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(2), 108–118.
- Andryawan, Andryawan, Laurencia, Cindy, & Putri, Maria Phoebe Tjahja. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah.

- Ardaniyah, Nuril, & Widiyono, Aan. (2023). Strategi Guru dalam Mengatasi Tindakan Perundungan pada Siswa di Kelas VI SD Al-Islam. *BASICA Journal of Arts and Science in Primary Education*, 3(1), 81–94. <https://doi.org/10.37680/basicav3i1.3676>
- Ardiawati, Ilma Agnia, & Aliyyah, Rusi Rusmiati. (2024). Strategi Guru dalam Mengelola Kelas Rendah. *Karimah Tauhid*, 3(1), 167–182. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11612>
- Avianingrum, Nabila Ayu. (2024). Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia : Tinjauan Normatif Yuridis hukum tetapi juga perlu didukung oleh edukasi masyarakat , penguatan. *Jurnal Hukum Dan Kenengaraan Politik*, 4(1), 52–76.
- Choiriyah, Siti, Masrurroh, Siti, Imamah, Nuzulul, Laili, Aisyah, & Kunaifi, Hatta. (2024). Peran Guru dalam Pencegahan Bullying di Sekolah. *Journal Educatione: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 112–126. <https://doi.org/10.31090/paudmotoric.v2i1.739>
- Cropley, Arthur J. (2019). Qualitative research methods: A practice-oriented introduction for students of psychology and education. In *Riga, Latvia: Zinātne*.(open access–doi: 10.13140/RG.2.1.3095.6888).
- Damayanti, Pelangi Dea Sri, Handayani, Fitri, Ramahwati, Yuli, Suhermah, Suhermah, Cahyani, Anisa Dian, & Tilova, Martina Hikmah. (2023). Peranan Psikologi Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan Siswa Sekolah Dasar. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.60>
- Daniati, Nurul Suci, & Aliyyah, Rusi Rusmiati. (2023). Pembelajaran Anti Perundungan: Persepsi Guru Kelas Rendah pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 2(6), 3022–3047. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i6.11083>
- Diniah Safara, Al Falaq Saiful Aziz, Sabillah Vania Indah, & Maulana Rijal. (2024). Pengaruh Pendidikan Karakter dan Multikultural dalam Membangun Sikap Toleransi dan Perdamaian pada Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(September), 1–12.
- Firmansyah, Fitriawan Arif. (2021). Peran Guru dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205–216. <https://doi.org/10.18592/jah.v2i3.5590>
- Gunawan, I. Made Sonny, & Hasnawati. (2023). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *At-Taujih : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(2), 67–78. Retrieved from <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>
- Idris, Muhammad, Syaifullah, Muh, Angga Rosaldy, A., Hesti Ramadani, A., Sandawana, Fitri, & Rahmawati, Sitti. (2024). Upaya Menanggulangi Bullying di Kalangan Pelajar: Strategi Efektif untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Positif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6), 95–99. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.847>
- Kemensesneg, RI. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

- Kiska, Nurul Delima, Putri, Cindy Rizani, Joydiana, Miranti, Oktarizka, Dhea Annisa, Maharani, Sisya, & Destrinelli, Destrinelli. (2023). Peran Profil Pelajar Pancasila untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 5(2), 4179–4188. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1116>
- Marasaoly, Salha, & Umra, Sri Indriyani. (2022). POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume IX, Nomor II Pencegahan Perundungan (Bullying) terhadap Siswa SD dan SMP dalam Implementasi Kota Peduli Ham di Kota Ternate. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94–112.
- Maulia, Zhafira Mardhatillah, Tetteng, Basti, & Hamid, Andi Nasrawaty. (2021). Hubungan Antara Perilaku Asertif dengan Kecenderungan Menjadi Objek Perundungan pada Siswa Berasrama. *JIVA: Journal of Behavior and Mental Health*, 2(1), 110–125. <https://doi.org/10.30984/jiva.v2i1.1523>
- Muhammad, Giantomi, Eq, Nurwadjah Ahmad, & Suhartini, Andewi. (2021). Konsep Takhalluq bi Akhlaqillah sebagai Proses dan Hasil Pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v7i1.104>
- Nadia, Robiyatun, Rusi Rusmiati Aliyyah. (2024). Strategi Guru dalam Mengatasi Perundungan pada Siswa Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(1), 279–295.
- Nurhakim, Haditsa Qur'ani, Sanusi, Iwan, Nur'aeni, Ulvah, & Muhammad, Giantomi. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Guna Pencegahan Tindak Perundungan Siswa. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 8(2), 166. <https://doi.org/10.32332/tapis.v8i2.9438>
- Putra Damawangsa, Adam, & Muhimmah, Hitta Alfi. (2025). Implementasi Program Anti Bullying untuk Mengoptimalkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDIT At-Taqwa Surabaya. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (JPPGSD)*, 13(2), 468–483.
- Rahmelia, Silvia, Prihadi, Stephanus, & Nopitha, Nopitha. (2023). Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Melalui Pendekatan Norma Agama dan Perubahan Perilaku dalam Mengatasi Bullying Antar Siswa di SMPN Satu Atap-1 Katingan Tengah. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 4(1), 40–50. <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i1.142>
- Ramadhanti, Ramadhanti, & Hidayat, Muhamad Taufik. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>
- Saksono, Lily Ambarwati, & Bernardus, Denny. (2023). Design of Balanced Scorecard as a School's Performance Measurement. *Binus Business Review*, 14(2), 171–183. <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i2.8901>
- Simbolon, Marlina Eliyanti, Nurhasanah, Aan, & Putri, Afiva Dwi. (2024). Edukasi Pencegahan Perundungan bagi Siswa SDN 1 Citangtu, Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(12), 3609–3614. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i12.756>
- Sukmawati, Rizma, & Aliyyah, Rusi Rusmiati. (2023). Strategi Guru dalam Mengatasi Perundungan di Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 2(6), 2870–2890. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i6.11067>

Widopuspito, Adena, & Sutarman, Sutarman. (2023). Penanggulangan Tindakan Perundungan Peserta Didik dalam Perspektif Islam di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. *Al-Manar*, 12(1), 38–46. <https://doi.org/10.36668/jal.v12i1.381>

Yonas, Husnul Hamdi, & Suherman, Asep. (2024). Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 323–328.